ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT BERDASARKAN SYARIAH ENTERPRISE THEORY PADA BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH

Yulia Muchtamarini¹, Jalaluddin^{*2}

^{1,2} Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala

e-mail: riri@mhs.unsyiah.ac.id¹, jalaluddin.fe@unsyiah.ac.id^{*2}

* Corresponding Author

Abstract

This study aims to determine the accountability of zakat management in Baitul Mal Kota Banda Aceh according to Sharia Enterprise Theory (SET). This study uses a descriptive approach using interviews (questions) as a data collection tool. Respondents in this study were the finance head department of Baitul Mal Kota Banda Aceh. The results of the study show that: (1) In terms of accountability to Allah SWT is in accordance to SET, the opinion of the Baitul Mal Kota Banda Aceh supervisory board stated that they have done and run their duties according to the fatwa of the National Sharia Council; (2) The accountability to Direct stakeholders for donors / customers is in accordance to SET concept as seen from the disclosure of zakat fund reports which include the receipt of zakat funds obtained and distributed to parties in need through ZIS fund realization reports; (3) Horizontal accountability of direct stakeholders to employees is partly in accordance to SET, seen from the disclosure of policies on wages and remuneration to employees and extension workers. In terms of providing training and education to employees, Baitul Mal only provides training programs for extension workers; (4) Horizontal indirect stakeholders is in accordance to SET, as can be seen from the disclosure of information to the wider community in accessing zakat funds. However, not all information can be given openly, because there are some of the reports that become privacy; (5) The accountability to the environment is not accordance to SET, because Baitul Mal has never carried out programs related to the environmental preservation, because in this case Baitul Mal focuses on managing zakat funds intended directly to the community.

Keywords: Accountability, Sharia Enterprise Theory, Zakat Management

1. Pendahuluan

Beberapa entitas syariah yang hanya mengarah pada laba perusahaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan konvensional, laporan tersebut berdasarkan dengan *Proprietary* dan *Entity Theory* yang berfokus pada laba. *Enterprise Theory* dianggap mewakili tujuan yang dimiliki oleh bisnis Islam dibandingkan dengan *Proprietary Theory* dan *Entity Theory*, karena dalam *Enterprise Theory* tidak hanya memfokuskan pada laba saja tetapi pada *stakeholder* juga. Akan tetapi *Enterprise Theory* dianggap belum mampu menampung aspek akuntabilitas dan tunduk terhadap Syariah. Maka dikembangkan pula *Syariah Enterprise Theory* (SET) berdasarkan metafora zakat karena dianggap lebih dapat mewakili yang pada dasarnya memiliki karakter keseimbangan (Triyuwono, 2000).

Pada masa kini penyaluran dana zakat fitrah maupun zakat mal atau infaq dan shadaqah telah

tersusun dengan baik. Zakat fitrah tidak hanya dikumpulkan oleh amil zakat yang kemudian akan disalurkan secara langsung ke pihak yang berhak menerima zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS), namun juga dana-dana yang telah diterima tersebut kemudian akan dikelola sehingga meningkatkan kualitas hidup dan dapat mengembangkan ekonomi penerima dana ZIS. Pengelolaan ZIS telah dilakukan oleh beberapa Badan Amil Zakat (LAZ) atau Lembaga Amil Zakat (BAZ), yang mana keduanya telah mendapat perlindungan dari pemerintah.

Bentuk perlindungan pemerintah terhadap Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan juga

dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat (Sucipto, 2011:1).

Baitul Mal diakui sebagai Badan Amil Zakat bagi masyarakat Aceh. Baitul Mal Kota Banda Aceh mengumpulkan ratusan wajib zakat (muzakki) potensial dalam kegiatan sosialisasi zakat agar tersosialisasinya zakat lebih luas, zakat tepat yang sasaran, dan meningkatkan kesadaran muzakki tentang pentingnya menyalurkan zakatnya pada BAZ. Calon muzakki berasal dari berbagai kalangan, baik dari pribadi, praktisi, akademisi, pedagang/pengusaha, dan lainnya. Jika diamati potensi zakat yang ada di Kota Banda Aceh sangat besar diperkirakan menyentuh angka milyaran rupiah setiap tahunnya apabila seluruh muzakki menyetorkan 10% zakatnya melalui Baitul Mal (Baitul Mal, 2016).

Potensi zakat terbesar yaitu berasal dari kalangan pengusaha/pedagang, namun yang menjadi permasalahan saat ini, persentase muzakki dari kalangan pengusaha dan pedagang masih tergolong kecil, hampir 90 persen muzakki berasal dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain itu masalah yang terus-terusan muncul juga masih terjadi, yaitu banyaknya muzakki yang memilih untuk menyalurkan sendiri secara langsung kepada penerima zakat tidak melalui BAZ dalam hal ini Baitul Mal, dan bahkan masih banyak muzakki yang memilih menyalurkan zakatnya ke daerah lain (Merdeka.com). Dari masalah yang dipaparkan tersebut terlihat bahwa penerimaan zakat di Kota Banda Aceh belum merata.

Kejadian diatas memperlihatkan bahwa muzakki membutuhkan kepercayaan atas pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) oleh BAZ atau LAZ. Pihak pengelola ZIS harus mampu memberikan akuntabilitas publik atas pengelolaan ZIS tersebut agar kepercayaan ini akan dapat terbentuk. BAZ harus membuktikan kejujuran pengelolaan, transparansi dan profesionalitasnya, guna menunjukkan kinerja yang bagus sehingga wajib zakat percaya untuk menyalurkan zakatnya ke lembaga tersebut (Harian Pelita, 2012). Akuntabilitas atas pengelolaan zakat berdasarkan perspektif SET memberikan peran yang sangat penting dalam kehidupan, karena dalam pandangan SET mengakui adanya akuntabilitas kepada kelompok *stakeholder* yang lebih luas, dalam hal ini adalah masyarakat, tidak hanya kepada pemilik

perusahaan saja. Maka dari itu, *Syariah Enterprise Theory* ini lebih tepat untuk suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai nilai syariah.

2. Tinjauan Pustaka

Syariah Enterprise Theory (SET)

Purwitasari (2011) "*Enterprise Theory* masih perlu diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam agar dapat digunakan sebagai teori dasar bagi suatu ekonomi dan akuntansi Islam". SET dapat diartikan sebagai "suatu *social integration* yang berawal dari adanya kepentingan emansipatoris untuk membebaskan *knowledge* yang selalu terperangkap dalam dunia materiil menjadi suatu *knowledge* yang juga mempertimbangkan aspek non-materiil". Aspek non materiil yang dimaksud adalah spek spiritual atau nilai-nilai Illahi. *Knowledge* yang dimaksud adalah SET, merupakan suatu hasil refleksi diri yang berusaha memahami bahwa selain tindakan rasional juga bertujuan sebagai tindakan dasar dalam hubungan manusia dan alam, selain itu juga sebagai tindakan komunikasi dalam hubungan dengan sesama sebagai objek yang terdapat tindakan dasar lainnya yang terkait dalam hubungan manusia dan pencipta-nya.

Meutia (2010: 243) menyatakan dimensi SET dalam akuntabilitas pengelolaan zakat Baitul Mal adalah sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas vertikal hanya ditujukan kepada Allah SWT. Beberapa aspek yang menunjukkan akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT menurut SET adalah sebagai berikut:
 - 1) Terdapat opini dari dewan pengawas Baitul Mal
 - 2) Terdapat laporan mengenai fatwa dan aspek yang dipatuhi dan tidak dipatuhi beserta alasannya.
- b. Akuntabilitas horizontal, dibagi menjadi 2 bagian, yakni manusia (*direct-stakeholder & indirect-stakeholder*) dan alam.
 - 1) *Direct-stakeholder* kepada nasabah meliputi:
 - Laporan dana zakat;
 - Penjelasan atas sumber dan penggunaan dana zakat.
 - 2) *Direct-stakeholder* kepada karyawan meliputi:
 - Adanya pengungkapan mengenai kebijakan tentang upah dan remunerasi;

- Mengungkapkan kebijakan non-diskriminasi yang ditujukan kepada karyawan dalam hal training, kesempatan meningkatkan karier training;
 - Pemberian pendidikan dan pelatihan kepada karyawan;
- 3) *Indirect-stakeholder* meliputi:
- Adanya laporan tentang inisiatif untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap Lembaga Baitul Mal;
 - Membantu masyarakat untuk meningkat kualitas dalam hal pendidikan, kesehatan dan agama.
 - Jumlah bantuan yang telah diberikan beserta sumbernya.
- 4) Alam
- Melakukan pertimbangan untuk isu isu pada lingkungan seperti kerusakan hutan, pencemaran air, pencemaran udara dan hemat energi;
 - Melakukan laporan jika ada pembiayaan yang diberikan kepada usaha yang berpotensi dapat merusak lingkungan terhadap perkebunan, kehutanan dan pertambangan;

Zakat

Mazhab maliki berpendapat, zakat dapat diartikan seperti mengeluarkan sebagian dari harta khusus yang telah mencapai nishab (batas jumlah minimal yang diwajibkan zakat), untuk diberikan kepada orang yang wajib menerimanya. Dalam pespektif fuqaha, zakat diartikan sebagai penunaian hak wajib yang terdapat dalam harta. Putri (2017) “Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta khusus dan diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir”.

Suatu manajemen organisasi pengelolaan zakat dapat dikatakan sudah baik apabila telah menerapkan tiga kata kunci yang dinamakan *Good Organization Governance* yaitu amanah, professional, dan transparan (Buchory, 2011:82).

Akuntabilitas

Kewajiban untuk mempersiapkan laporan (tidak diharuskan berkaitan dengan laporan keuangan) atau laporan terhadap tindakan yang didalamnya ada tanggung jawab dapat diartikan sebagai akuntabilitas.

Didalam akuntabilitas juga melibatkan akunti dan akuntor. Dimana akuntor adalah pihak yang berkewajiban untuk memberikan laporan sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap akunti (Gray,2001). Mahsun (2015:169) “Akuntabilitas dapat diartikan sebagai pihak pemegang amanah (agen) yang memberikan pertanggungjawabannya dalam menyajikan, mengungkapkan dan melaporkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya terhadap pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki kewenangan dan hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”.

Akuntabilitas memberikan penjelasan tentang peran dan tanggung jawab, untuk mendukung usaha yang menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen serta pemegang saham (Sutedi, 2011: 4). Akuntabilitas dianggap penting terlebih pada organisasi nirlaba karena organisasi nirlaba lebih banyak melibatkan kepentingan *stakeholder*, dimana pengelolaan harus memiliki tanggung jawab dan mereka harus meyakinkan bahwa mereka adalah pihak yang tepat untuk dipercaya.

Mempertanggungjawabkan segala bentuk pengelolaan sumber daya beserta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan terhadap entitas pelaporan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berkala juga merupakan bentuk akuntabilitas. (Nordian, 2009: 129).

Kerangka Pemikiran

Kerangka dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

3. Metodologi Penelitian

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan studi deskriptif, studi deskriptif dirancang untuk menggambarkan karakteristik seseorang, kondisi atau kejadian dari data yang dikumpulkan (Sekaran & Bougie, 2017). Unit analisis dalam penelitian ini yaitu Baitul Mal Kota Banda Aceh, dimana horizon waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Cross Sectional*, yaitu informasi data penelitian dikumpulkan hanya sekali selama periode harian, mingguan, atau bulanan.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung tanpa adanya perantara oleh peneliti pada variabel yang ingin diteliti untuk tujuan khusus penelitian (Sekaran & Bougie, 2016:113). Data primer dapat dilakukan melalui wawancara (*interview*), daftar pertanyaan (*questionnaire*), atau melihat langsung (*observed*) (Sekaran & Bougie, 2016:116).

Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara singkat mengenai akuntabilitas pengelolaan dana zakat berdasarkan *Syariah Enterprise Theory*. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yaitu laporan akuntabilitas dana zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh. Hasil data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, dan kemudian dianalisis hasil penelitian untuk dijadikan kesimpulan.

Metode Analisis Data

Sugiyono (2017:335) “Analisis data adalah suatu proses menyusun mencari dan secara sistematis melalui data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi dengan cara mengorganisir data ke dalam beberapa bagian, dijabarkan ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari lalu disimpulkan. Tahapan-tahapan ini digunakan untuk mempermudah orang lain dan juga diri sendiri untuk memahami penelitian”. Adapun tahapan-tahapan analisis data yang dapat dilihat dalam uraian berikut ini:

Pada tahap pertama, peneliti melihat Baitul Mal Kota Banda Aceh secara umum, baik dari segi struktur organisasi maupun kebijakan/peraturan-peraturan yang

diterapkan pada Baitul Mal Kota Banda Aceh, serta catatan, dokumen resmi dan dokumentasi yang tersedia dari berbagai sumber informasi terkait dengan Akuntabilitas dalam mengelola dana zakat yang berdasarkan *Syariah Enterprise Theory*. Kemudian peneliti mengumpulkan data dari hasil yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh dan laporan Akuntabilitas pengelolaan dana zakat. Dengan adanya berbagai sumber data itu menunjukkan bahwa terdapat banyak data yang harus ditelaah dengan baik oleh peneliti.

Setelah mengumpulkan data hasil wawancara, kemudian akan peneliti telaah, analisis, dan membuat ringkasan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana zakat berdasarkan *Syariah Enterprise Theory* melalui laporan akuntabilitas pengelolaan dana zakat agar dapat menjadi pembelajaran dan menambah nilai positif bagi pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Peneliti akan menganalisis dari hasil ringkasan wawancara dan laporan Akuntabilitas yang telah dibuat oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh, apakah sudah berdasarkan *Syariah Enterprise Theory*. Setelah menganalisis, kemudian peneliti menarik kesimpulan dari hasil yang telah didapatkan lalu memberikan masukan positif Baitul Mal Kota Banda Aceh.

4. Hasil Dan Pembahasan

Akuntabilitas Vertikal: Allah SWT

Akuntabilitas terhadap Allah menurut SET salah satunya dapat dilihat dari opini dewan pengawas Baitul Mal sebagai upaya memenuhi prinsip Syariah. Dewan pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh mengungkapkan bahwa mereka menjalankan dan melaksanakan tugas berpedoman pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai ketentuan-ketentuan yang berbasis Syariah. Dewan pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan agar tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip Syariah yang telah difatwakan oleh DSN. DSN adalah bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang tugasnya menumbuhkan perekonomian Indonesia dengan mengelola dan mengembangkan nilai-nilai syariah.

Sesuai dengan konsep SET yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, saat ini Baitul Mal Kota Banda Aceh dari segi agama melaksanakan

program atau kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan, seperti hasil wawancara mengenai kontribusi Baitul Mal dalam bidang keagamaan, seperti pembinaan masjid, pelaksanaan tilawatil qur'an, memberikan pelatihan kepada tenaga dakwah, berdasarkan wawancara dengan pihak Baitul Mal menyatakan:

"Penyaluran zakat dengan memberikan bantuan TPA, Tahzil Mayat (Laki-laki dan Perempuan) dan kepada Mushalla kemudian kepada Masjid dan kepada balai pengajian. Kegiatan ini merupakan kontribusi yang diberikan untuk memakmurkan masjid (Memakmurkan para anggota Masjid, Balai pengajian dan Mushalla). Yang mana bantuan untuk masjid bernilai Rp.5.000.000 untuk Mushalla Rp.4.000.000 untuk TPA Rp.2.500.000 untuk Balai Pengajian Rp.1.500.000 untuk tahzil mayat Rp.2.500.000 untuk 90 kampung".

Akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT berdasarkan *Syariah Enterprise Theory* (SET) sudah sesuai, dilihat dari kegiatan-kegiatan dan program

yang dijalankan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh seperti pembinaan masjid, pelaksanaan tilawatil qur'an, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan acara keagamaan.

Akuntabilitas Horizontal: Direct Stakeholder Terhadap Nasabah

Berkaitan dengan akuntabilitas terhadap donator/nasabah Baitul Mal, memberikan perhatian yang cukup besar, karena Baitul Mal menerapkan visi "mewujudkan umat yang sadar zakat, pengelola uang amanah dan *mustahiq* yang sejahtera". Artinya bahwa dalam pengelolaan zakat, Baitul Mal dapat mempertanggungjawabkan zakat kepada para donator/nasabah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap kualifikasi anggota Baitul Mal Kota Banda Aceh. Baitul Mal Kota Banda Aceh memberikan perhatian kepada para nasabahnya dengan mengungkapkan atau melaporkan dana zakat melalui laporan realisasi penyaluran ZIS, seperti terlihat pada table 4.1

Tabel 4.1
Laporan Realisasi Penyaluran ZIS

Tahun	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
2016	Pendapatan:			
	ZIS	18.504.500.000	19.381.678.084	104.74%
	Penyaluran:			
	ZIS	20.441.147.045	15.985.025.000	78.20%
2017	Pendapatan:			
	ZIS	18.604.500.000	14.639.943.517	78.69%
	Penyaluran:			
	ZIS	23.728.123.592	17.346.132.341	73.10%
2018	Pendapatan:			
	ZIS	18.604.500.000	17.962.650.080	96.55%
	Penyaluran:			
	ZIS	21.871.255.042	15.904.245.115	72.72%

Sumber: Data Kualitatif Baitul Mal (2018)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pendapatan ZIS tahun 2016 sebesar Rp.18.504.500.000, sedangkan realisasi menunjukkan angka Rp.19.381.678.084, sehingga persentase pendapatan ZIS sebesar 104.74%. Tahun 2017 sebesar Rp.18.604.500.000, sedangkan realisasi menunjukkan angka Rp.14.639.943.517, sehingga persentase pendapatan ZIS sebesar 78.20%. Tahun 2018 sebesar Rp.18.604.500.000, sedangkan realisasi menunjukkan angka Rp.17.962.650.080 sehingga persentase pendapatan ZIS sebesar 96.55%. Hal tersebut menunjukkan bahwa persentase pendapatan ZIS dari tahun 2016 – 2018 mengalami kenaikan/penurunan.

Pendapatan dan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2016 yakni mencapai 104.74%, yang artinya realisasi pendapatan ZIS selama tahun tersebut melebihi 100%. Pada tahun yang sama pula persentase realisasi penyaluran ZIS menunjukkan nilai paling tinggi yaitu, 78.20%. Sedangkan pendapatan dan realisasi terendah terjadi pada tahun 2017 yakni hanya 78.69%, dan persentase realisasi penyaluran paling rendah terjadi pada tahun 2018 yaitu 72.72%.

Akuntabilitas Horizontal: *Direct Stakeholder* Terhadap Karyawan

Baitul Mal Sesuai dengan *Syariah Enterprise Theory* (SET) yaitu berkaitan dengan kontribusi terhadap karyawan dapat berupa kebijakan tentang upah dan remunerasi, kebijakan non diskriminasi dalam hal upah, training, kesempatan berkarier, serta pelatihan dan pendidikan. Dalam laporan Baitul Mal mengungkapkan item yang berkaitan dengan karyawan seperti upah dan remunerasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan PPh, iuran jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Baitul Mal Kota Banda Aceh termasuk kedalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Banda Aceh, oleh karena itu Baitul Mal tidak mempunyai program khusus layanan pelatihan dan pendidikan untuk pegawai.

Segala bentuk pelatihan dan pendidikan serta training untuk pegawai Baitul Mal disediakan secara langsung oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Sehingga semua karyawan maupun tenaga penyuluh mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam hal pelatihan atau training. Hal ini terlihat dalam laporan realisasi anggaran Baitul Mal yang tidak menyajikan adanya belanja untuk menunjang pelatihan karyawan. Seperti hasil wawancara dengan Subbag Keuangan Bapak Syukri Fahmi, SE, Ak., yaitu:

“Baitulmal tidak mempunyai program khusus layanan kesehatan untuk pegawai baitulmal. Pelatihan ada kami berikan untuk tenaga penyuluh. Kalau untuk pegawai melalui BKPSDM, kalau mereka buat pelatihan kami sertakan karyawan kami”.

Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa pelatihan dan training yang diadakan oleh Baitul Mal hanya sebatas pelatihan untuk tenaga penyuluh zakat saja. Jadi, dalam hal ini akuntabilitas horizontal terhadap karyawan berdasarkan *Syariah Enterprise Theory* belum sepenuhnya sesuai, karena dapat dilihat bahwa kontribusi Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam hal Akuntabilitas Horizontal terhadap karyawan masih terdapat kekurangan.

Akuntabilitas Horizontal: *Indirect Stakeholder*

Baitul Mal Kota Banda Aceh terus menerus berinisiatif untuk melakukan pembenahan dalam meningkatkan akses ke masyarakat luas dalam bentuk

publikasi atas hasil pengelolaan dana ZIS yang diterima dan disalurkan kepada yang berhak melalui *website* resmi yang dikelola oleh pihak Baitul Mal, kemudian melalui *talkshow*, melalui sosialisasi, brosur dan baliho yang diterbitkan oleh Baitul Mal, masing masing satu baliho untuk setiap kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh. Sehingga akses masyarakat dalam melihat pengungkapan atas penerimaan dan penyaluran dana zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh secara umum sudah terpenuhi. Namun, tidak semua informasi dapat diberikan secara terbuka, karena ada sebagian dari laporan yang menjadi privasi yang harus dijaga kerahasiaannya oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Kontribusi Baitul Mal kepada *indirect-stakeholders* sangat besar terutama dalam bidang pendidikan dengan menyalurkan beasiswa kepada siswa-siswa setempat. Kemudian dari segi pemberdayaan usaha mikro bagi masyarakat, Baitul Mal memberikan modal untuk membuka usaha untuk perorangan tetapi bukan dalam bentuk kelompok karena Baitul Mal mengkategorikan fakir dan miskin yang bersifat individu.

Akuntabilitas Horizontal: Alam

Berdasarkan hasil wawancara dan laporan realisasi penyaluran ZIS yang sudah penulis lakukan, bahwa Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh belum pernah berkontribusi terhadap alam. Dari hasil wawancara terkait kontribusi Baitul Mal terhadap Alam, karena lembaga Baitul Mal mengelola dana zakat, oleh karena itu Baitul Mal tidak ada melakukan program dalam menjaga alam, kecuali melalui dana infaq tapi penggunaan dana infaq juga harus melalui proses rapat dengan dewan pengawas pimpinan wali kota, apakah dapat digunakan atau tidak.

Dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Akuntabilitas terhadap alam, Baitul Mal belum pernah melakukan program-program terkait penjagaan terhadap alam, karena dalam hal ini Baitul Mal fokus pada pengelolaan dana zakat yang diperuntukkan langsung kepada masyarakat, terkecuali melalui dana infaq.

5. Kesimpulan, Saran dan Keterbatasan Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil

kesimpulan dari penelitian yaitu, untuk pelaporan dana ZIS yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagian sesuai dengan konsep SET dan sebagian belum sesuai dengan konsep SET, yaitu:

1. Dari segi akuntabilitas kepada Allah SWT sudah sesuai SET yaitu, berupa opini Dewan pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh yang sudah mengungkapkan bahwa mereka menjalankan dan melaksanakan tugas berpedoman pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Baitul Mal Kota Banda Aceh juga melaksanakan program atau kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah menerapkan Akuntabilitas kepada Allah SWT.
2. Akuntabilitas terhadap *direct-stakeholders* bagi donator/nasabah sudah sesuai dengan konsep SET dilihat dari pengungkapan laporan dana zakat yang meliputi penerimaan dana zakat yang diperoleh, dan penyalurannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui laporan realisasi dana ZIS.
3. Akuntabilitas horizontal *direct-stakeholders* bagi karyawan berdasarkan SET sebagian sudah sesuai, dilihat dari adanya laporan tentang kebijakan tentang upah dan remunerasi kepada karyawan dan tenaga penyuluh. Dilihat dari segi segi pemberian pelatihan dan Pendidikan kepada karyawan, Baitul Mal hanya menyediakan program-program pelatihan kepada tenaga penyuluh. Sedangkan untuk pegawai Baitul Mal sendiri, pelatihan dan pendidikan diadakan secara langsung oleh BKPSDM. Sehingga seluruh karyawan maupun tenaga penyuluh mendapatkan hak yang sama.
4. Akuntabilitas horizontal *indirect-stakeholder* berdasarkan SET sudah sebagian sesuai, terlihat dari pengungkapan atas keterbukaan informasi kepada masyarakat luas dalam mengakses dana zakat. Namun, tidak semua informasi dapat diberikan secara terbuka, karena ada sebagian dari laporan yang menjadi privasi. Dilihat dari kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Baitul Mal sangat peduli terhadap peningkatan kualitas hidup pada masyarakat dalam bidang pendidikan yang dapat terlihat dari bantuan yang disalurkan untuk pendidikan.

5. Sedangkan Akuntabilitas terhadap alam belum sesuai, karena Baitul Mal belum pernah melakukan program-program terkait penjagaan terhadap alam, karena dalam hal ini Baitul Mal fokus pada pengelolaan dana zakat yang diperuntukkan langsung kepada masyarakat, terkecuali melalui dana infaq.

Saran

Berdasarkan dari kesimpulan dan hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dijabarkan, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak Baitul Mal, khususnya Kota Banda Aceh agar dapat menambah program dan kegiatan mengenai kesehatan dan alam agar sesuai dengan teori *Syariah Enterprise Theory* (SET), dan tidak mengurangi kontribusi terhadap pengelolaan zakat.
2. Diharapkan pada peneliti selanjutnya untuk dapat melanjutkan penelitian ini dengan menambah teori lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, dan memperluas pertanyaan kepada pihak yang mengelola zakat.
3. Bagi peneliti selanjutnya dengan menggunakan variabel yang sama, peneliti selanjutnya dapat dilakukan pada Baitul Mal yang ada di Kab/Kota lainnya agar dapat mengambil kesimpulan yang menghasilkan cakupan yang lebih luas.
4. Dengan menggunakan judul yang sama peneliti selanjutnya dapat memperluas jumlah responden, terutama responden pada pengawas pengelolaan zakat dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori mengenai SET untuk akuntabilitas pengelolaan zakat masih sangat terbatas untuk diakses.
2. Ruang lingkup penelitian ini sangat terbatas pada pengelolaan zakat sementara laporan realisasi anggaran sudah tergabung antara zakat, infaq, dan sedekah sehingga sulit untuk mengidentifikasi pengelolaan dana zakat.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto.2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Baitul Mal. 2016. Baitul Mal Kota Banda Aceh Kumpulkan Ratusan Calon Muzakki. Diakses [31/12/2019] <<http://baitulmal.bandaacehkota.go.id/2016/05/26/baitul-mal-banda-aceh-kumpulkan-ratusan-calon-muzakki/>>.
- Dharir, Siddiq adh. 2005. *Transaksi dan Etika Bisnis dalam Islam*. Terjemahan Saptono Budi Satryo dan Fauziah R., cetakan I. Jakarta: Visi Insani Publishing.
- Endahwati. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS), *Jurnal Ilmiah dan Humanika Jinh Volume 4 Nomor (1), Singaraja Desember 2014 ISSN 2089-3310. Universitas Pendidikan Ganesha, Bali*.
- Fakhrudin. 2011. *Fiqh dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana.
- Gray, Javad. 2001. "Social and Environmental Disclosure, and Corporate Characteristic: A Research Note and Extention". *Journal of Business Finance and Accounting*: Vol 28 No.3, pp. 327-356.
- Harian Pelita. 2012. Sebaiknya Muzakki Berzakat Melalui Badan Amil Zakat. Artikel Agama dan Pendidikan di Publikasikan. Diakses [30/12/2019] < www.pelita.or.id/kontak.php. Diakses 9 Oktober 2016>.
- Hermawan, Sigit dan Restu Widya Rini. 2016. Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Perspektif Syariah Enterprise Theory. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Sidoarjo, Jawa Timur.
- Megawati dan Trisnawati. 2014. Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/shadaqah pada BAZ Kota Pekanbaru, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi.
- Merdeka.com. 2016. Pengusaha dan pedagang di Aceh tak menyalurkan zakat ke Baitul Mal. Diakses [30/12/2019] <<https://www.merdeka.com/peristiwa/pengusaha-dan-pedagang-di-aceh-tak-menyalurkan-zakat-ke-baitul-mal.html>>
- Meutia, Intan. 2010. Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Manajemen Laba untuk KAP Big 5 dan Non Big 5. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 7, No. 3.
- Meutia, Inten. 2010. *Menata Pengungkapan CSR di Bank Islam*. Citra Pustaka Indonesia. ISBN 978-979-19327-1-4.
- Nurhayati. 2009. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Nordiawan, Dedi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan Edisi kesatu*. Jakarta: Salemba Empat.
- Purwitasari. 2011. *Analisis Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory*. Skripsi. FEB. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Putri, Ratna Lutfiani. 2017. Analisis Tingkat Kesehatan Bank (Menggunakan RGEC) Pada Bank Rakyat Indonesia periode 2013-2015. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Rasul, Agung Abdul et al, 2012. *Ekonomi Mikro, Mitra Wacana Media*. Jakarta. Ekonometrika – Formula dan Aplikasi Dalam Menejemen, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Rini. 2016. Pengelolaan Dana Zakat Infaq, dan Shadaqah Perspektif Syariah Enterprise Theory. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 1 (1) Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Sidoarjo, Jawa Timur*.
- Sekaran, Uma dan Bougie, R. 2017. *Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian*. Jakarta. Salemba Empat.
- Sucipto, Agus, 2011. Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga pengelola Zakat. Artikel. Garut: [31/12/2019]<Bazkabgarut.blogspot.com>.
- Sudewo. 2004. *Manajemen Zakat*, Jakarta: Institu.

- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan Keabsahan. Data R&D*. Bandung : Alfabeta.
- _____. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.
- _____. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sudewo, Eri. 2014. *Manajemen Zakat*, Ciputat: Institut Manajemen Zakat.
- Soedarso. 2014. *Penilaian Kinerja Fisik (Iviateri) Koperasi Syariah Menurut Perspektif Shari'ate Enterprise Theory dengan Nilai Tambah Syari'ah dan Zakat sebagai Indikator*. Skripsi.
- Triuwono, Iwan. 2000. *Sinergi Oposisi biner: formulasi tujuan dasar laporan keuangan akuntansi syariah*. IQTISAD jurnal of Islamic Economics. Vol. 4, No. 1.
- _____. 2012. *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi*. Jakarta: Penerbit Rajawali Press.
- Wahid, H dan A. Radiah. 2010. *Localization of Malaysian Zakat Distribution Perceptions of Amil And Zakat Recipients*. Malaysia.